

LKIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



**BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyampaian LKIP Tahun 2023 pada dasarnya menggambarkan Informasi Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya secara utuh selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dalam periode Tahun 2023. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Tasikmalaya, Januari 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya,



H. NURAEIDIN, S.IP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650504 198403 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2. Struktur Organisasi.....	4
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	7
1.4. Isu Aktual	14
1.5. Sistemika Penyusunan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis.....	17
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	18
2.1.2. Tujuan dan Sasaran BPBD	23
2.2. Perjanjian Kinerja.....	26
2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Pengukuran Kinerja.....	28
3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja	31
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023	38
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2023 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)	39

3.1.4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	40
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	42
3.2. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	7
Tabel 1.2.	Komposisi PNS BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2023	8
Tabel 1.3.	Rekapitulasi Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023	8
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2023	9
Tabel 1.5.	Rekapitulasi Aset Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	10
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	24
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	26
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	27
Tabel 3.1.	Skala Penilaian	30
Tabel 3.2.	Capaian Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2022	31
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja BPBD Tahun 2021-2023	38
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dengan Target Renstra BPBD Tahun 2021-2026	39
Tabel 3.5.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada BPBD Tahun 2023	41

Tabel 3.6.	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	55
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang kerkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya sebagai Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan, pencegahan dan penanganan darurat dan pasca kebencanaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Seiring dengan amanat untuk menjamin kegiatan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan tepat sasaran, BPBD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan, pencegahan dan penanganan darurat dan pasca kebencanaan harus mampu menghadirkan proses pelaksanaan kegiatan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, BPBD Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan darurat dan pasca kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan darurat dan pasca kebencanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

1. Kepala;
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah kabupaten Tasikmalaya;
2. Unsur Pengarah, terdiri atas :
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD;

- b. Anggota yang terdiri dari Pejabat Instansi/ Lembaga Pemerintahan terkait dan masyarakat profesional.

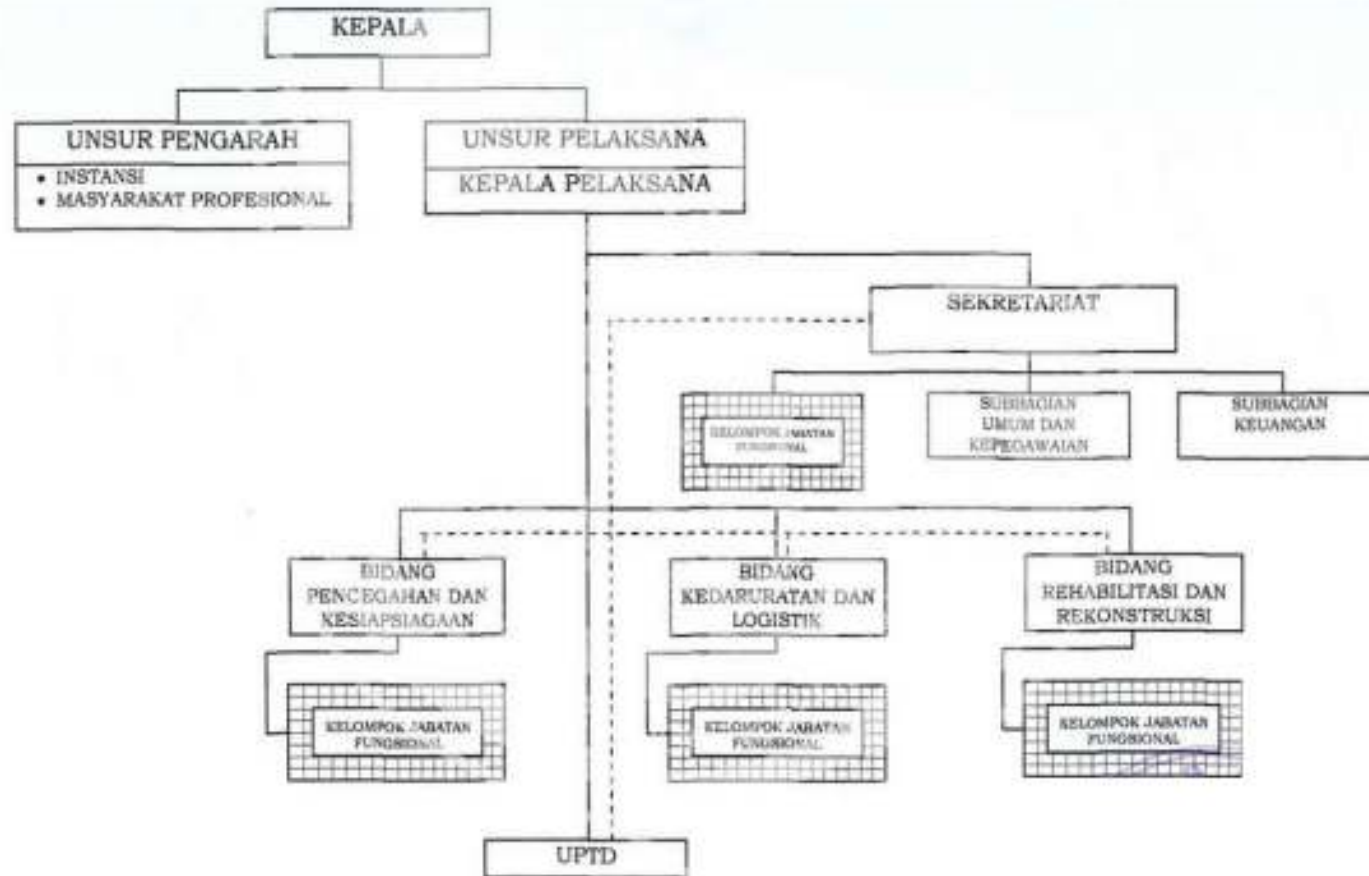
Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah, dan mempunyai fungsi yaitu :

- a) Perumusan Kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b) Pemantauan;
- c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala badan penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yang terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**



1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 32 orang laki-laki atau 91% dan perempuan sebanyak 3 orang atau 9 %, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	-	1
2	Sekretariat	6	1	7
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	1	5
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	4	-	4
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	4	1	5
6	UPTD Pemadam Kebakaran	13	-	13
Jumlah Total		32	3	35

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

2. Jabatan

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.2.
Komposisi PNS BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon I	0
2	Eselon II	1
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	4
5	JFU	20
6	JFT	6
	Jumlah Total	35

Sumber : DUK BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Sarjana sebanyak 25 orang atau 71 %, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 10 orang atau 29 % seperti tertera ada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Pelaksana	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	7	-	-	7	-	-	-	-	-
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	-	-	5	-	-	-	-	-
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	4	-	-	4	-	-	-	-	-
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	5	-	-	5	-	-	-	-	-

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	UPTD Pemadam Kebakaran	13	-	-	3	-	-	10	-	-
Jumlah Total		35	-	-	25		-	10		-

Sumber : DUK BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

4. Pangkat dan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai yang memiliki golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang memiliki Golongan II sebanyak 9 orang, sedangkan pegawai yang memiliki Golongan IV sebanyak 4 orang dan Golongan III sebanyak 22 orang.

Tabel 1.4.
Rekapitulasi Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG										
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kepala BPBD	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	7	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
6	UPTD Pemadam Kebakaran	13	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	6
Jumlah Total		35	1	-	3	10	4	5	3	2	-	1	6

Sumber : DUK BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarelawan.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum mencukupi dan sesuai standarisasi sarana dan Prasarana yang harus dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5.
Rekapitulasi Aset Sarana dan Prasarana
Badab Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023

No	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	13
2	Transportable Generating Set	Karate / SH19000DX	Pembelian	2013	1	1
3	Transportable Generating Set	Multipro	Pembelian	2013	1	1
4	Jeep	Ford / Rescue/ R.DC XLS 22L 4X4 MT	Hibah	2013	1	1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Isuzu / Panther TBR 54F TURBO LV	Hibah	2013	1	1
10	Truck + Attachment	Hino / WU342R-HKMTJD3	Pembelian	2016	1	1
11	Pick Up	Isuzu / Panther TBR 54 PICKUP TURBO	Hibah	2013	1	1
12	Pick Up	Isuzu / Panther TBR 54 PICKUP TURBO	Hibah	2013	1	1
20	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Beb Light Truck NKR66	Pembelian	2001	2	1
21	Mobil Pemadam Kebakaran	Isuzu / Beb Light Truck NKR66	Pembelian	2003	2	1
22	Mobil Pemadam Kebakaran	Hino / WU342R-HKMTJD3 (130 HD)	Pembelian	2018	1	1

23	Mobil Tangki Air	Isuzu / NKR 71 HD E2-2	Hibah	2017	1	1
24	Mobil Tangki Air	Isuzu / NMR 71T 5.8	Pembelian	2020	1	1
25	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Isuzu / NKR 71 HD E2-2	Hibah	2013	1	1
26	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	Toyota / Hilux Fire Jeep	Pembelian	2019	1	1
27	Perahu Penumpang	Porta Bote / Alpha Series	Hibah	2017	1	1
28	Perahu Penumpang	Mahakam / LCR	Pembelian	2017	1	1
29	Perahu Penumpang	Tohatsu / Lokal	Hibah	2017	1	1
30	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	Boogie / River Boat R6	Pembelian	2020	1	2
32	Mesin Gergaji Logam	Hyundai / CUT-OFF MACHINE HDCM 355	Pembelian	2020	1	1
33	Gergaji Chain Saw	Motoyama / 9900A	Pembelian	2020	1	2
36	Global Positioning System	Magellan / Explorist 610	Pembelian	2014	1	4
40	Global Positioning System	Garmin / Oregon 650	Pembelian	2017	1	1
41	alat ukur universal lainnya (dst)	Davis / Pemantau Cuaca	Pembelian	2015	1	1
42	alat ukur universal lainnya (dst)	Slemen / Pengukur Getaran Seismik	Pembelian	2015	1	1
43	alat ukur universal lainnya (dst)	Pengukur Ketinggian Air	Pembelian	2015	1	1
44	Container	Knock Down Container 20"	Hibah	2018	1	1
133	Papan Visual/Papan Nama	Toshiba / Papan Visuil	Pembelian	2014	1	1
139	Alat Kantor Lainnya	Tenda Posko	Hibah	2012	1	1
140	Alat Kantor Lainnya	Tenda Pengungsi	Hibah	2012	1	3
143	Alat Kantor Lainnya	WTP	Hibah	2012	1	1
144	Alat Kantor Lainnya	Polarian Seris / PS-PH40/Senter Rescue HID Search Light	Hibah	2012	1	1
145	Alat Kantor Lainnya	Kipor / Genset 5,5 KVA	Hibah	2012	1	1
146	Alat Kantor Lainnya	Dome / Dome/Tenda Keluarga	Hibah	2012	1	12
158	Alat Kantor Lainnya	Icom / RIG/IC 2200H	Hibah	2012	1	1
159	Alat Kantor Lainnya	Elsol / Solar Cell/Solar Home System	Hibah	2012	1	5

164	Alat Kantor Lainnya	Icom / Handy Talky	Hibah	2012	1	2
166	Alat Kantor Lainnya	Icom / SSB	Hibah	2012	1	1
167	Alat Kantor Lainnya	Silinger / Perahu Karet Kap. 8 orang/LCR	Hibah	2013	1	1
168	Alat Kantor Lainnya	Parsun / Mesin Perahu Kap. 25 PK/Four Stoke	Hibah	2013	1	1
169	Alat Kantor Lainnya	Repeater	Pembelian	2016	1	2
171	Alat Kantor Lainnya	Boulder / Perahu Karet/River Boot Kap. 8 orang	Pembelian	2016	1	1
172	Alat Kantor Lainnya	Dj Phatom 3 / Drone	Pembelian	2016	1	1
173	Alat Kantor Lainnya	Tandu Vertical	Pembelian	2016	1	1
174	Alat Kantor Lainnya	Nitecore / Senter LED MH41	Pembelian	2016	1	1
175	Alat Kantor Lainnya	Lampu Sorot Tower Mobile	Pembelian	2017	1	1
176	Alat Kantor Lainnya	Honda / Genset Portable	Pembelian	2017	1	1
177	Alat Kantor Lainnya	Lampu Sorot Tiang Tripod	Pembelian	2017	1	5
182	Alat Kantor Lainnya	Apc / BX1100CI	Hibah	2018	1	1
222	Unit Power Supply	Drolink / UPS	Pembelian	2015	1	2
224	Camera film	Nikon / D 5100	Pembelian	2013	1	1
225	Camera film	Canon / Power ISO Shoot SX160	Pembelian	2013	1	1
226	Tustel	Samsung / NX. 10	Pembelian	2012	1	1
235	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2013	2	2
236	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2013	1	9
246	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2015	1	6
252	Alat Pemadam/Portable	Lokal	Pembelian	2016	1	7
259	Alat Pelencur Kebakaran	Arrowline	Pembelian	2021	1	3
262	Alat Pembantu Kebakaran	OFI	Pembelian	2021	1	1
263	Alat Pembantu Kebakaran	Nozzpro	Pembelian	2021	1	2
265	Alat Pembantu Kebakaran	Lokal / Selang Penghisap	Pembelian	2022	1	1

299	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Gs Ns 60 / UPS Battery	Pembelian	2015	1	12
311	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Braket Asesoris Box Battery	Pembelian	2015	1	6
323	Alat Studio Pemetaan lainnya	Garmin / GPS Montana 650	Pembelian	2013	1	2
325	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-T2375MXW	Hibah	2018	1	1
326	Handy Talky (HT)	Yaesu / FT-270	Pembelian	2013	1	3
329	Facsimile	Panasonic / KX-FT963	Pembelian	2012	1	1
330	Telepon Satelit	Samsung / Galaxy A21s	Pembelian	2020	1	2
332	Unit Tranceiver Ssb Stationery	Icom / ICM 700PRO	Hibah	2018	1	1
333	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	Single Galvanis / Tower Triangel Galvanis	Pembelian	2013	1	1
334	Unit Tranceiver VHF Stationary	Acces Point/Power Station	Pembelian	2017	1	2
338	Switcher Combination	Hp / 1910-8G	Hibah	2018	1	1
339	Switcher Combination	Aten / CS1734B/ KVM Switch	Hibah	2018	1	1
340	Self Supporting Tower	Wireless Tower Tiangle	Pembelian	2015	1	20
360	Antenna Tuning Unit	Ubiquitynbullet M2Hp / Antena Omni	Pembelian	2015	1	2
362	Alat Kedokteran umum lainnya	Scba Hypro / HYPRO 30Mpa	Pembelian	2019	1	1
363	Stabilizer	Ica / FR3000(3KVA)	Hibah	2018	1	1
364	Fotovol (Sel Surya)	Shiyoku / Solar Panel	Pembelian	2015	1	6
370	Pakaian Pelindung	DRGER / Anti Serangga	Pembelian	2022	1	1
371	Sepatu Pelindung	Harvik / Firefighter	Pembelian	2022	1	3
381	P.C Unit	Intel Nuc / Intel Celeron N2820	Pembelian	2015	1	40
474	Server	Xeon / E3-1220v3	Pembelian	2015	1	1
475	Server	Windows 2012 / OS Server/BPBD	Pembelian	2015	1	1
476	Server	Server Tower	Pembelian	2015	1	2
478	Server	Hp / File Server Proliant ML350G6-180	Hibah	2018	1	1
479	Server	Acer / Vertion VES2718(intel core i7/8gb/1tb/win10 Pro)	Pembelian	2018	1	1

480	Peralatan Jaringan lainnya	Bc 25 / Grounding Tower	Pembelian	2015	1	1
481	Peralatan Jaringan lainnya	Lilin Ptz 1.2 Mp / IP Camera	Pembelian	2015	1	4
485	Peralatan Jaringan lainnya	Ubiquity / Access Point Power Station 2,4 Ghz	Pembelian	2015	1	6
491	Peralatan Jaringan lainnya	Belden / UTV Cable Kat-6	Pembelian	2015	1	2
493	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	Nomex III A	Pembelian	2021	1	1
494	Tenda	Tenda Peleton/Serbaguna	Pembelian	2017	1	2
496	Tenda Pleton	Tenda Pleton	Pembelian	2020	1	1
497	Tenda Pleton	Lokal / Tenda Pleton	Pembelian	2020	1	1
498	Tenda Pleton	D600 / Tenda Posko	Pembelian	2020	1	2

1.4. Isu Aktual

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Sebagaimana esensi dari tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan darurat dan pasca kebencanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. BPBD Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi BPBD antara lain sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang ideal secara kuantitas sebagaimana hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, maupun dari segi kualitas yang masih menunjukkan kesenjangan kapasitas dan

kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;;

2. Belum memiliki dokumen-dokumen perencanaan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/ legal maupun Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Tasikmalaya;
3. Keterbatasan alokasi anggaran yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai fungsi penunjang pengelolaan pencegahan, penanganan darurat, pasca bencana serta pemadam kebakaran;;
4. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah atau dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana baik pada pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana serta pada penanganan pemadaman kebakaran;
6. Hanya memiliki 1 (satu) pos sektor pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani;
7. Kurangnya SDM yang dimiliki yang mempunyai keahlian atau bersertifikat minimal pemadam satu;
8. Belum memiliki relawan kebakaran yang terbentuk sesuai dengan ketentuan di Kepmendagri No. 364.1-306 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

1.5. Sistematika Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- 1.4. Isu Aktual
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

BAB. IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1. Perencanaan Strategis

BPBD Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen BPBD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan, perumusan Renstra BPBD tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan

strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta'awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersukusuku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta'awun) dalam al- Qur'an disebut beberapa kali, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-2 diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan

kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzirkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata "Islam" berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) 'Salm' (مسلم) (yang berarti damai; 2) Berasal dari kata (اسلم) 'aslama' (سَلِمَ) (yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap "Sang Khaliq"; 3) Saliim' (سليم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam' (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam (اسلام)

RPJMD Kab.Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-3 merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasihsayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil `alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek

Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang

penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya, secara umum BPBD terkait langsung dengan misi keempat, yaitu Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui

pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran BPBD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mampu menghadapi berbagai macam potensi ancaman bencana, penanganan terorganisir dengan baik;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD;
2. Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana.

Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mampu menghadapi berbagai macam potensi ancaman bencana, penanganan terorganisir dengan baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	Poin
			Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	Poin

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Tasikmalaya) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Anggaran atau DPA.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	100 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	174,17 Poin	- Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	0,64 Poin	

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.200.901.038
2	Program Penanggulangan Bencana	2.723.000.000
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	75.600.000
JUMLAH TOTAL		8.999.501.038

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	100 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	174,17 Poin	- Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	0,64 Poin	

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.887.360.280
2	Program Penanggulangan Bencana	2.923.000.000
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	75.600.000
JUMLAH TOTAL		8.885.960.280

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi

kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan LKIP ini dilakukan dengan mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari Sistem Informasi yang ada pada BPBD Kabupaten Tasikmalaya baik laporan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya yang bersifat insidental, sedangkan data eksternal berasal dari Dinas/Instansi terkait dan masyarakat.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur. Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke taraf kegiatan, Tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan mengukur capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagaiberikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{Re\ alisasi}{Re\ ncana} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{Re\ ncana - (Re\ alisasi - Re\ ncana)}{Re\ ncana} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

Tabel 3.1.
Skala Penilaian

No	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	> 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Target dan Realisasi Kinerja BPBD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	100 Poin	69,8 Poin	85 %
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	174,17 Poin	159,14 Poin	109%
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	0,64 Poin	0,58 Poin	90%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Indeks Risiko Bencana BPBD tercapai atau melebihi target, dengan capaian kinerja 109 % dikarenakan penurunan akan risiko bencana di nilai positif dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kerentanan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada Nilai SAKIP BPBD yaitu 85 % dikarenakan target yang dibebankan di awal renstra adalah 100 % meskipun begitu ada hal positif akan kenaikan nilai dari tahun sebelumnya dari nilai evaluasi Sakip sebesar 47,68 poin dengan kategori C menjadi 69,6 poin dengan kategori B dan nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah sebesar 90 % dikarenakan ada hasil penilaian terhadap 7 prioritas dan 71 indikator yang belum bisa terpenuhi oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya .

Sasaran pertama yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD, Nilai Evaluasi SAKIP BPBD sebesar 69,8 poin dengan kategori B (Baik). artinya akuntabilitas perencanaan kerjanya baik dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana, Nilai Indeks Risiko Bencana yaitu sebesar 159,14 poin hasil tersebut mempunyai dampak positif karena penurunan angka risiko bencana dikatakan berhasil dalam pencapaiannya dengan target yang ditetapkan sebesar 174,14 poin rumusan capaian dapat dihitung sebagai berikut :

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu baha-ya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik

dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

(1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sedangkan Nilai Indeks Kapasitas atau Ketahanan Daerah diperoleh nilai sebesar 0,58 poin dari target 0,64 poin yaitu belum mencapai target karena nilai positif dari nilai indeks kapasitas atau ketahanan daerah adalah mengalami peningkatan, Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

Ada 7 prioritas dari penilaian Indeks Kapasitas atau Ketahanan Daerah yaitu :

1. Prioritas 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, terbagi indikator :
 - 1) Indikator 1 yaitu Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana (pertanyaan kunci);
 - 2) Indikator 2 yaitu Pembentukan BPBD;
 - 3) Indikator 3 yaitu Tentang Pembentukan Forum PRB;
 - 4) Indikator 4 yaitu Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan;
 - 5) Indikator 5 yaitu Kebijakan Daerah tentang RPB;
 - 6) Indikator 6 yaitu Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB;
 - 7) Indikator 7 yaitu Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 8) Indikator 8 yaitu Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana;

- 9) Indikator 9 yaitu Komitmen DPRD terhadap PRB.
2. Prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu yang terbagi dalam indikator :
 - 1) Indikator 10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
 - 2) Indikator 11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah;
 - 3) Indikator 12 Peta Kapasitas dan kajiannya;
 - 4) Indikator 13 Rencana Penanggulangan Bencana.
3. Prioritas 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang terbagi dalam indikator :
 - 1) Indikator 14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat;
 - 2) Indikator 15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya;
 - 3) Indikator 16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha;
 - 4) Indikator 17 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis;
 - 5) Indikator 18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional;
 - 6) Indikator 19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB;
 - 7) Indikator 20 Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan;
 - 8) Indikator 21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;

- 9) Indikator 22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan;
 - 10) Indikator 23 Penyimpanan/pergudangan Logistik PB;
 - 11) Indikator 24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik;
 - 12) Indikator 25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat;
 - 13) Indikator 26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat;
4. Prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana yang terbagi pada indikator :
- 1) Indikator 27 Penataan ruang berbasis PRB;
 - 2) Indikator 28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik;
 - 3) Indikator 29 Sekolah dan Madrasah Aman Bencana;
 - 4) Indikator 30 Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana;
 - 5) Indikator 31 Desa Tangguh Bencana.
5. Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang terbagi pada indikator :
- 1) Indikator 32 Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir;
 - 2) Indikator 33 Perlindungan daerah tangkapan air;
 - 3) Indikator 34 Restorasi Sungai;
 - 4) Indikator 35 Penguatan Lereng;
 - 5) Indikator 36 Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - 6) Indikator 37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan;
 - 7) Indikator 38 Pemantauan berkala hulu sungai;
 - 8) Indikator 39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi;

- 9) Indikator 40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami;
 - 10) Indikator 41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota;
 - 11) Indikator 42 Restorasi lahan gambut;
 - 12) Indikator 43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor.
6. Prioritas 6 Perkuat Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang terbagi pada indikator :
- 1) Indikator 44 Rencana Kontijensi Gempabumi;
 - 2) Indikator 45 Rencana Kontijensi Tsunami;
 - 3) Indikator 46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
 - 4) Indikator 47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami;
 - 5) Indikator 48 Rencana kontijensi banjir;
 - 6) Indikator 49 Sistem peringatan dini bencana banjir;
 - 7) Indikator 50 Rencana kontijensi tanah longsor;
 - 8) Indikator 51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor;
 - 9) Indikator 52 Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - 10) Indikator 53 Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - 11) Indikator 54 Rencana kontijensi erupsi gunungapi;
 - 12) Indikator 55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi;
 - 13) Indikator 56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi;
 - 14)
 - 15) Indikator 57 Rencana kontijensi kekeringan;
 - 16) Indikator 58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan;
 - 17) Indikator 59 Rencana kontijensi banjir bandang;
 - 18) Indikator 60 Sistem peringatan dini bencana banjir

bandang;

- 19) Indikator 61 Penentuan Status Tanggap Darurat;
- 20) Indikator 62 Penerapan sistem komando operasi darurat;
- 21) Indikator 63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana;
- 22) Indikator 64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban;
- 23) Indikator 65 Perbaikan Darurat;
- 24) Indikator 66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh;
- 25) Indikator 67 Penghentian status Tanggap Darurat Bencana.

7. Prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang terbagi pada indikator :

- 1) Indikator 68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah;
- 2) Indikator 69 Pemulihan infrastruktur penting;
- 3) Indikator 70 Perbaikan rumah penduduk;
- 4) Indikator 71 Pemulihan Penghidupan masyarakat.

Dalam 71 Indikator yang ada terdapat 284 pertanyaan yang harus diisi dengan eviden yang harus sesuai dengan pertanyaan tersebut.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja BPBD Tahun 2021-2023 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja BPBD Tahun 2021-2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2023
1	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mampu menghadapi berbagai macam potensi ancaman bencana, penanganan terorganisir dengan baik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	N/A	69,8 Poin
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	168,36 Poin	159,14 Poin
			Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	N/A	0,58 Poin

Tingkat Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa beberapa indikator bisa tercapai dengan baik meskipun belum terdapat data yang ada pada tahun 2021 mengenai capaian hasil Evaluasi SAKIP dan Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah tahun 2021 tren positif di capai pada nilai Indkes Risiko Bencana karena semakin menurunnya indeks risiko bencana suatu daerah menggambarkan ketangguhan daerah tersebut dengan kesiapsiagaan terhadap benc

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021-2023 dengan target Renstra BPBD Tahun 2021-2026 pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023
dengan Target Renstra BPBD Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Renstra	Realisasi 2023
1	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD	N/A	100 Poin	69,8 Poin
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	168,36 Poin	149,3 Poin	159,14 Poin
			Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	N/A	0,85 poin	0,58 Poin

Realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra, berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator sasaran yang telah ditetapkan terealisasi dan beberapa telah mencapai target Renstr

3.1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kinerja tahun 2023 ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut kami sajikan dalam sorting data untuk setiap sasaran yaitu :

- Sasaran pertama, Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD. Indikator yang mendukung sasaran pertama, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP BPBD pada tahun 2022 di tahun 2023 sebesar 69,8 poin.
- Sasaran Kedua, Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana, yaitu Nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 159,14 poin, dan Nilai Indeks Kapasitas atau Ketahanan Daerah sebesar 0,58 poin.

Berdasarkan data, bahwa beberapa sasaran BPBD di tahun anggaran 2023 dapat dikatakan telah berhasil dicapai dan tepat sasaran karena kedua indikator beberapa telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Renstra BPBD Tahun 2021-2026 maupun Renja BPBD Tahun 2023.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari semua sasaran adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal BPBD dan seluruh stakeholders di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sepanjang tahun anggaran 2023 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada BPBD untuk Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 3.5.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
pada BPBD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	85	95,75	0
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	109	99,5	9,5
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	90	99,5	0

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, BPBD Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, beberapa target indikator telah tercapai

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (Dua) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke dua indikator BPBD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 8.885. 960.280,-.

Berdasarkan data, tahun anggaran 2023 pada program kegiatan utama BPBD yang ditujukan untuk mencapai target kinerja kedua indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 8.885. 960.280,- yang diserap BPBD sebesar Rp. 8.621.820.829,- (97,03%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 264.139.451,- (2,97%) .

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, BPBD Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Tasikmalaya rata-rata indikator realisasinya melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Kerjasama tim yang baik. Dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

3. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA BPBD Tahun Anggaran 2023.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 BPBD Kabupaten Tasikmalaya :

Tabel 3.6.
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan BPBD	Nilai Evaluasi SAKIP	100 poin	69,8 Poin	85,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.887.360.280	5.637.921.654	95,76
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000	37.353.649	98,30
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.353.649	95,03
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.326.410.730	4.088.846.726	94,51
						Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4.326.410.730	4.088.846.726	94,51
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.235.550	446.649.479	99,20
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.235.550	202.705.050	98,77
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.590.000	98,98
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.700.000	94,00

						Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	75.000.000	100,00
						Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.654.429	99,72
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.330.000	193.934.750	96,81
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.830.000	92.434.750	93,53
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.500.000	101.500.000	100,00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	872.384.000	871.137.050	99,86
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	672.384.000	671.158.150	99,82
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.995.900	100,00
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100.000.000	99.983.000	99,98
2	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	174,17 Poin	159,14 Poin	109%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.923.000.000	2.908.399.175	99,50

		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	0,64 Poin	0,58 Poin	90%	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.041.000.000	2.031.931.925	99,56
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota	1.841.000.000	1.839.500.000	99,92
						Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000	96.601.000	96,60
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	95.830.925	95,83
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	782.000.000	779.985.000	99,74
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	782.000.000	779.985.000	99,74
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.000.000	96.482.250	96,48
						Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	100.000.000	96.482.250	96,48
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	75.600.000	75.500.000	99,87

						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	75.600.000	75.500.000	99,87
						Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.600.000	75.500.000	99,87

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 pada BPBD Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Nilai Evaluasi SAKIP BPBD

Nilai Evaluasi SAKIP BPBD pada tahun 2022 di tahun 2023 sebesar 69,8 yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik. Nilai realisasi belum bisa mencapai target karena target yang dibebankan sebesar 100 poin. Indikator ini ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	100
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.353.649	95,03
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	4.326.410.730	4.088.846.726	94,51
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	125

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.235.550	202.705.050	98,77
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.590.000	98,98
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 paket	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.700.000	94
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Kunjungan Tamu	75.000.000	75.000.000	100
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.654.429	99,72
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.830.000	92.434.750	93,53
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.500.000	101.500.000	100
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	672.384.000	671.158.150	100
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	36 Unit	100

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.995.900	100
Keluaran	Jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Unit	4 Unit	100

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	99.983.000	100
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	100

2. Nilai Indeks Risiko Bencana dan Nilai Indeks kapasitas/ Ketahanan Daerah

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 yaitu sebesar 159,14 poin ada penurunan dari tahun sbelumnya, artinya risiko daerah di Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan dan dikatakan baik untuk daerah karena trend positif dari nilai indeks risiko bencana adalah penurunan dan bisa melampaui target. Sedangkan Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah Tahun 2023 sebesar 0,58 poin adanya peningkatan dari tahun sbelumnya tapi tidak melampaui atau mencapai target yang ditentukan pada Tahun 2023 hal ini di sebabkan akan beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Indikator ini ditunjangoleh kegiatan sebagai berikut

:

Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1.841.000.000	1.839.500.000	100
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Penyusunan rencana Kontijensi

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi untuk setiap bencana prioritas di daerah	100.000.000	96.601.000	96,60
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk bencana prioritas di daerah	100.000.000	95.830.925	96
Keluaran	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	100 Orang	100

Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/ Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ketempat yang aman	782.000.000	779.985.000	100
Keluaran	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	10 orang	10 Orang	100

Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana kabupaten/ Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya dokumen penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota melalui pengkajian kebutuhan pasac bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi ran rekontruksi pasac bencana (R3P)	100.000.000	96.482.250	96,48
Keluaran	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana Kabupaten/ Kota melalui pengkajian kebutuhan pasac bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi ran rekontruksi pasac bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	256.546.100	248.643.670	96,92
Keluaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	100

3.2. Realisasi Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandinganantara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan.

Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektifjika

pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapaian output.

Pada tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 (Tiga) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran Rp.8.885.960.280,- (Delapan Milyar Delapan ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Realisasi Keuangan (Rp)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.887.360.280	5.637.921.654	95,76	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000	37.353.649	98,30	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	100,00	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.353.649	95,03	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.326.410.730	4.088.846.726	94,51	100
3	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4.326.410.730	4.088.846.726	94,51	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.235.550	446.649.479	99,20	100
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.235.550	202.705.050	98,77	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.590.000	98,98	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.000.000	4.700.000	94,00	100
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	75.000.000	100,00	100
8	Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000	124.654.429	99,72	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.330.000	193.934.750	96,81	100
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.830.000	92.434.750	93,53	100
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.500.000	101.500.000	100,00	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	872.384.000	871.137.050	99,86	100
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	672.384.000	671.158.150	99,82	100
12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.995.900	100,00	100
13	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100.000.000	99.983.000	99,98	100

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.923.000.000	2.908.399.175	99,50	100
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.041.000.000	2.031.931.925	99,56	100
14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ kota	1.841.000.000	1.839.500.000	99,92	100
15	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000	96.601.000	96,60	100
16	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	95.830.925	95,83	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	782.000.000	779.985.000	99,74	100
17	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	782.000.000	779.985.000	99,74	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100.000.000	96.482.250	96,48	100
18	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	100.000.000	96.482.250	96,48	100
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	75.600.000	75.500.000	99,87	100
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	75.600.000	75.500.000	99,87	100
19	Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.600.000	75.500.000	99,87	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKIP ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 secara umum tujuan, program

kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2023 dan Renstra dikategorikan BAIK. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Berikut pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat dilihat dari perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks risiko Bencana	174,13	159,14	109%
		Indeks Kapasitas Daerah	0,64	0,58	90,63%
Rata-rata capaian kinerja					100,02%

Ket: *Capaian Sementara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada BPBD secara umum tujuan, program/kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja pada BPBD sebesar 100,02%. Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem

kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satusama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta di dalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator adalah walaupun untuk pencapaian target banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, BPBD mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja serta penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.